





MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

Garda Terdepan, Pastikan Semua Fungsi Berjalan



KR-Istimedia

Prosesi pengucapan sumpah dan janji Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta pada 2019 silam.

YOGYA (KR) - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam arah pembangunan di suatu daerah. Sebagai mitra eksekutif, DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni pembentukan peraturan daerah (perda), pengawasan serta penganggaran. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dilengkapi alat kelengkapan yang sifatnya tetap.

Unsur paling utama dalam alat kelengkapan dewan ialah Pimpinan. Khusus di DPRD Kota Yogyakarta, terdiri dari tiga wakil yakni Ketua yang dijabat H. Danang Rudyatmoko dari Fraksi PDI Perjuangan, serta dua orang wakil yakni HM Fursan SE dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua I, dan Dhiani Novitasari SPd dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II. Sebagai garda terdepan maka Pimpinan DPRD harus memastikan semua tugas pokok dan fungsi dari lembaga dewan mampu berjalan sesuai koridor.

"Kita sudah memiliki tata tertib sebagai acuan serta pedoman kerja yang sudah disepakati bersama. Itu menjadi dasar kami untuk saling mengingatkan di internal dewan. Dan sepanjang tahun ini, alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik," tandas Danang.

Salah satu tugas dan wewenang Pimpinan DPRD, imbuh Danang ialah melaksanakan keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota dewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Danang bersyukur, selama ini belum ada keputusan dari Badan Kehormatan atas sanksi bagi para anggotanya.

Secara internal, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sesuai diatur dalam tata tertib di antaranya memimpin agenda rapat serta menyimpulkannya untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan, membagi tugas antara ketua dan wakil ketua, mengkoordinasikan kegiatan tiap alat kelengkapan serta menyampaikan laporan kinerja yang digelar secara khusus melalui sidang paripurna.

"Ketugasan internal itu sudah menjadi agenda rutin. Bahkan ketika ada persoalan yang membutuhkan solusi segera, kami para pimpinan langsung melakukan musyawarah.

Jangan sampai persoalan itu berlarut, apalagi yang berkaitan dengan pembangunan," urai Danang.

Sedangkan tugas dan wewenang yang sifatnya eksternal, Pimpinan DPRD secara otomatis mewakili lembaga dalam berhubungan dengan instansi lain. Termasuk pula mewakili DPRD di pengadilan serta melakukan rapat konsultasi dengan kepala daerah atau pimpinan instansi vertikal.

Di samping itu, Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Artinya, tindakan atau keputusan setiap rapat paripurna yang dipimpin oleh satu atau lebih unsur pimpinan, merupakan atas nama seluruh unsur pimpinan. Oleh karena itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua memiliki kekuatan hukum yang sama. (Dhi)-f

Jalin Hubungan Harmonis untuk Sinergi Pembangunan





KR-Istimedia

H. Danang Rudyatmoko, HM Fursan SE, Dhiani Novitasari SPd

YOGYA (KR) - Pimpinan DPRD tidak bisa dipisahkan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu strategi yang digulirkan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta ialah menjalin hubungan harmonis. Tidak hanya terhadap unsur pimpinan di internal dewan melainkan dengan kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) tingkat Kota Yogyakarta.

Hubungan harmonis tersebut tidak lain ialah guna menjaga sinergi-pembangunan di daerah. Terlebih Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di samping sebagai ibu kota provinsi DIY. Dengan begitu antar pimpinan daerah baik di tingkat eksekutif, legislatif serta yudikatif perlu terjalin hubungan yang harmonis.

"Forkompinda di Kota Yogyakarta ini hubungannya berjalan dengan baik. Harmonisasi ini terus kami bangun, tidak hanya dalam komunikasi informal melainkan juga formal," ungkap HM Fursan.

Senada juga disampaikan Dhiani Novitasari. Menurutnya, dengan hubungan yang harmonis tersebut maka kemana arah tujuan pembangunan di Kota Yogyakarta bisa lebih sinergis. Sebagai contoh, setiap menggelar sidang paripurna sebagai rapat tertinggi yang ada di dewan, Pimpinan DPRD selalu melibatkan unsur Forkompinda untuk hadir. Baik dari pihak kepolisian, TNI, kejaksaan maupun pengadilan.

"Dari situ semua bisa mengetahui setiap keputusan yang kami tetapkan. Sehingga kemana arah pembangunan di kota ini bisa dipahami bersama. Harapannya ketika ada persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, maka semua unsur pimpinan daerah bisa bersinergi bersama dalam menuntaskan persoalan itu," paparnya. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahan

Unsur Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta melakukan salam komando.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005